

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Definisi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

##### 2.1.2 Fungsi Bank

Dari pengertian Bank diatas, berikut adalah beberapa fungsi bank, antara lain:

a. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).

b. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum merupakan jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

c. Penghimpun Dana Simpanan Masyarakat

Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

d. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan/atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal.

### 2.1.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 20/POJK.03/2014 BAB I Ayat 1 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR.

A. Adapun fungsi dari BPR yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan simpanan tersebut.
- b. Memberikan kredit sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap nasabah.
- c. Melakukan kerjasama antar BPR dengan lembaga keuangan lainnya dan menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, giro atau jenis lainnya pada bank lain.

Tugas dari PD BPR BKK menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 22 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah Pasal 7, antara lain:

- a. Merupakan salah satu lembaga penggerak ekonomi kerakyatan.
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha.

#### 2.1.4 Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut Mulyadi (2001:5) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Sedangkan prosedur adalah uraian kegiatan klirekal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara sragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri atas jaringan prosedur-prosedur yang saling berkaitan. Prosedur merupakan urutan dari pekerjaan klirekal, yang dibuat atas semua transaksi perusahaan yang terjadi

berulang-ulang.

#### 2.1.5 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:165), pengertian pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

##### A. Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2008:164) unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi.
3. Praktik dan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam

pelaksanaannya. Jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya maka dapat menimbulkan resiko.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya perlu adanya seleksi calon karyawan dan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan.

#### B. Tujuan Pengendalian Internal

Suatu sistem pengendalian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan karena adanya sistem pengendalian diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2008:163) menyatakan bahwa tujuan pengendalian internal adalah:

- 1 . Menjaga kekayaan organisasi
- 2 . Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- 3 . Mendorong efisiensi
- 4 . Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen

Sesuai dengan tujuannya maka pengendalian internal tersebut dapat dibagi 2 yaitu:

1. pengendalian internal administrasi (*Internal Administrative Control*),  
Pengendalian internal administrasi terdiri dari prosedur dan catatan yang membantu manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.
2. pengendalian internal akuntansi (*Internal Accounting Control*).  
Pengendalian internal akuntansi terdiri dari prosedur dan laporan dan untuk menjaga aktivitas perusahaan. Pengendalian internal akuntansi

yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kredit yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

### C. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO atau *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* memperkenalkan adanya 5 komponen pengendalian internal yang meliputi:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Setiap organisasi, tidak akan peduli apakah perusahaan tersebut perusahaan besar atau kecil, tetapi perusahaan itu harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Jika lingkungan pengendalian lemah kemungkinan besar diikuti lemahnya komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian meliputi faktor-faktor berikut:

- Filosofi manajemen dan gaya operasi

Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan memperlakukan karyawan adil dan hormat.

- Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika

Penting bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau tidak etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan pengendalian internal.

- Komitmen terhadap kompetensi

Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreatifitas dan inisiatif dalam menghadapi kondisi yang dinamis.

- Komite audit dari dewan direksi

Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan.

- Struktur organisasi

Perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

- Metode penetapan otoritas dan tanggung jawab

Hak yang dimiliki karena posisi formal seseorang untuk memberi perintah ke bawah.

- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan, evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, perlindungan karyawan dan pemberhentian karyawan.

## 2. Penaksiran Resiko

Semua perusahaan, baik besar maupun kecil pasti menghadapi resiko internal maupun eksternal dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.

Resiko itu bersumber dari:

- a. Tindakan tidak sengaja
- b. Tindakan sengaja
- c. Bencana alam atau kerusuhan politik
- d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer

### 3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi:

- a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak
- b. Pemisahan tugas
- c. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi
- d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan
- e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.

Tujuan utama sebuah sistem informasi akuntansi antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid
- b. Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya
- c. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat
- d. Mencatat transaksi pada periode yang tepat

e. Menyajikan transaksi dan pada periode akuntansi yang tepat

## 5. Pengawasan Kinerja

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi:

a. Supervisi yang efektif meliputi pelatihan karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengoreksi kesalahan yang dilakukan, serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap perusahaan.

b. Akuntansi pertanggung jawaban

1. Penyusunan anggaran, kuota, penjadwalan, harga pokok standart, dan standart kualitas.

2. Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana, dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang signifikan.

3. Prosedur untuk investigasi penyimpangan yang signifikan dan mengambil tindakan untuk mengoreksi kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

c. Pengauditan internal

1. *Review* terhadap *reabilitas* dan *integritas* informasi operasional dan informasi finansial

2. Penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal

3. Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan, prosedur manajemen dan terhadap aturan dan *regulasi* yang berlaku

4. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen

### 2.1.6 Kredit

#### A. Pengertian kredit

Pengertian kredit menurut Hasibuan (2009), kredit berasal dari kata Italia “*Credere*” yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjamannya beserta bunganya sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet Hasibuan (2009).

Pengertian kredit menurut Kasmir (2000:92) yaitu kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pemberian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Pengertian kredit menurut Taswan (2012 :217), kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 seperti dikutip oleh Susilo, dkk, (2000 :70), kredit dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam

berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang ditetapkan.

#### B. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2002 : 74-76) adalah :

##### 1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan dari pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

##### 2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mentandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

### 3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

### 4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

### 5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini

merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### C. Tujuan Kredit

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2013:116) adalah sebagai berikut:

#### 1) Mencari keuntungan.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan *dilikuidir* (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

#### 2) Membantu Usaha Nasabah.

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan . Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

#### 3) Membantu Pemerintah.

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka

semakin baik, mengingat banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

#### D. Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi pihak bank menurut Kasmir (2008:100) antara lain :

##### 1) Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

##### 2) Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

##### 3) Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat.

##### 4) Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, Sehingga jumlah barang yang beredar dari satu

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

#### 5) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan diberikannya kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

#### 6) Untuk Meningkatkan Kegairahan Usaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

#### 7) Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

#### 8) Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberi kredit oleh

negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

#### E. Jenis-jenis kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, Kasmir (2000:99-102) antara lain:

##### a. Dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk digunakan dalam melakukan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang ditunjukkan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

##### b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
2. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
3. Kredit perdagangan, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan usaha debitur dibidang perdagangan. Biasanya

untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dari segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit jangka menengah, jangka waktu pengembaliannya 1 s/d 3 tahun waktu kreditnya berkisar antara satu sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi.
3. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 atau 5 tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit atau manufaktur untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
2. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik debitur selama ini.

e. Dari segi sektor usaha

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
2. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk membiayai jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang seperti peternakan kambing atau sapi.
3. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, besar.
4. Kredit pertambangan, kredit ini adalah jenis usaha tambang yang biayanya biasanya dalam jangka panjang, misalnya tambang emas atau minyak.
5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa atau pelajar.
6. Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

F. Prinsip-prinsip Perkreditan

Menurut Kasmir (2000 : 104-107) dalam melakukan penilaian kredit secara umum menggunakan prinsip 5C, dan prinsip 7P meliputi:

Prinsip 5C yang terdiri dari:

- 1) *Character* (Kepribadian atau Watak)

Yaitu mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas, segala tekad yang baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.

2) *Capital* (Modal Atau Kekayaan)

Yaitu dengan mempertimbangkan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

3) *Capacity* (Kemampuan Atau Kesanggupan)

Yaitu pertimbangan dengan cara menilai kemampuan debitur untuk sanggup melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan akan dibiayai dengan kredit tersebut.

4) *Collateral* (Jaminan Atau Agunan)

Yaitu pertimbangan dengan menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Jaminan tersebut nilai wajarnya harus lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan untuk melindungi bank.

5) *Conditions*

Yaitu pertimbangan dengan melihat batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang ada, yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu tempat.

Prinsip 7P yaitu:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga

mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* (golongan), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan atau barang atau orang atau jaminan asuransi.

#### G. Kebijakan Per Kreditan

Kebijakan per kreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program per kreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian.

Kebijakan per kreditan menurut Hasibuan (2009 : 92-93) antara lain :

##### 1) *Bankable*

Artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:

- a. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
- b. *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.

##### 2) Kebijakan Investasi

Merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder. Kebijakan risiko, kebijakan penyebaran kredit, serta kebijakan tingkat bunga.

- a. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasana bank seperti pembelian kantor, mesin dan ATK. Dana investasi primer harus didanai sendiri karena sifatnya tidak produktif

dan jangka waktunya panjang. Investasi primer ini mutlak harus dilakukan karena merupakan motor kegiatan operasional bank.

- b. Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.

### 3) Kebijakan Risiko

Kebijakan risiko maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.

### 4) Kebijakan Penyebaran Kredit

Kebijakan penyebaran Kredit maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.

### 5) Kebijakan Tingkat Bunga

Kebijakan tingkat bunga maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

## H. Penggolongan Kolektabilitas Kredit

Dalam peraturan BI No.7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran BI NO.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum, serta

peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan mengenai faktor-faktor dalam penetapan/penilaian kualitas kredit dan penggolongan kualitas kredit.

Ada beberapa faktor dalam menentukan kualitas kredit atau kualitas piutang pembiayaan, seperti faktor kemampuan bayar nasabah, ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, kinerja keuangan (*financial performing*) nasabah serta prospek usaha nasabah.

Berikut ini penggolongan kualitas (kolektibilitas) kredit yang meliputi:

a. Kredit lancar/ Pass /Kolektibilitas 1

Tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 hari.

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus /Special Mention/ Kolektibilitas 2

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari (31 hari s/d 90 hari).

c. Kredit Kurang Lancar/ Substandard/ Kolektibilitas 3

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari (90 hari s/d 120 hari).

d. Kredit Diragukan / Doubtfl/ Kolektibilitas 4

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari (120 hari s/d 180 hari).

e. Kredit Macet/ Loss/ Kolektibilitas 5

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (>180 hari).

Apabila kredit/pinjaman telah masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet, maka kredit digolongkan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF).

#### 2.1.7 Sistem Pemberian Kredit

Sistem pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut.

A. Tugas dan tanggung Jawab menurut Kuncoro (2002:99-109) meliputi:

a) Seksi administrasi kredit

Tugas dari seksi administrasi kredit adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen pinjaman mulai dari proses permohonan kredit sampai kredit tersebut lunas.

b) Seksi analisis kredit

Tugas utama dari seksi analisis kredit adalah melakukan analisis atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan usaha nasabah baik yang diperoleh secara

langsung maupun tidak langsung melalui berbagai instansi yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dan status hukumnya.

c) Seksi monitoring kredit

Tujuan utamanya adalah memonitoring perkembangan usaha dan ketepatan membayar bunga dan asuransi pokok kredit.

d) Seksi asuransi

Tugas utamanya adalah melakukan administrasi kredit yang diasuransikan baik asuransi jaminan kredit, asuransi jiwa, debeturnya, maupun asuransi kreditnya sendiri.

e) Seksi penagihan tunggakan

Tugas utamanya adalah melakukan administrasi terhadap kredit-kredit yang sudah macet.

f) Bagian pelayanan dana dan jasa

Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah/calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh nasabah berkaitan dengan produk dan jasa yang akan dipergunakan.

g) Bagian pelayanan pinjaman/kredit

Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan dalam hal pencairan kredit, angsuran kredit, perhitungan bunga, dan sebagainya.

h) Bagian kasir atau teller

Tugas utama dari bagian ini adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal penyetoran uang

i) Bagian akuntansi

Tugas-tugas bagian akuntansi meliputi:

- a. Mencetak laporan-laporan keuangan, antara lain neraca, dan laba rugi.
- b. Melakukan verifikasi atas transaksi bukti-bukti pembukuan yang ada
- c. Memastikan bahwa semua kegiatan bagian operasional telah dibukukan pada hari tersebut.

B. Dokumen pemberian kredit

a. Dokumen Permohonan Kredit

Dokumen ini merupakan formulir yang harus di isi oleh nasabah apabila akan mengajukan kredit yang biasanya berisikan alasan mengapa nasabah akan mengajukan kredit.

b. Dokumen analisis kredit

Merupakan dokumen untuk melakukan proses analisa kredit yang biasanya dilakukan melalui proses survei kepada nasabah.

c. Dokumen putusan kredit

Merupakan hasil dari analisa kredit yang berisi keputusan akan diterima atau ditolaknya suatu pengajuan kredit tersebut.

d. Dokumen jaminan kredit

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan kredit.

e. Dokumen pengikat jaminan kredit

Merupakan surat yang dibuat sebagai bukti atas barang jaminan yang dijaminakan oleh nasabah dalam pengajuan kredit.

f. Dokumen pencairan kredit

Dokumen ini dibuat setelah ada persetujuan pencairan kredit. Dokumen ini mengatur tentang pasal-pasal antara nasabah dengan pihak bank dan nasabah berkewajiban membayar kembali pinjamannya berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Proses Pemberian Kredit

a. Tahap kegiatan prakara dan permohonan kredit

Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan dengan menggunakan dokumen permohonan tersebut, lembaga pemberi kredit akan melakukan penelitian apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.

b. Tahap analisis dan evaluasi kredit

Analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya mencakup sebagai berikut:

- Identitas pemohon
- Tujuan permohonan kredit
- Riwayat hubungan bisnis dengan lembaga pemberi kredit
- Analisis 5C kredit

c. Tahap pemberian rekomendasi kredit

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekonomian kredit berdasarkan analisis/evaluasi yang dibuat oleh penganalisis kredit. Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh pejabat analisis kredit. Apabila perekomendasi telah merasa yakin atas rekomendasinya serta kelengkapan dokumen, selanjutnya menyerahkan dokumen kredit tersebut kepada pejabat pemutus dan mempertahankan pendapatnya bila diperlukan.

d. Tahap pemberian putusan kredit

Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan memberikan tandatangan pada formulir putusan kredit. Apabila putusan kredit telah diberikan, selanjutnya dokumen kredit diserahkan kepada administrasi kredit untuk dipersiapkan dokumen lainnya, seperti:

- Syarat penawaran putusan kredit, surat ini memuat struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dalam surat penawaran tersebut harus mencantumkan batas waktu kepada nasabah untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- Dokumen perjanjian kredit, perjanjian kredit memuat unsur-unsur perjanjian yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam putusan kredit dan memuat agunan yang diberikan dan pengikatnya.

- Dokumen untuk pencairan, dokumen untuk pencairan kredit merupakan pengikat nasabah dengan bank yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

#### 2.1.8 Kredit Macet

##### A. Pengertian kredit macet

Kredit macet menurut Sinungan (1993:57) adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan, sedangkan menurut Djumhana (1996:267) kredit macet yaitu apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Kredit macet menurut Sukardji (1984 :115) adalah piutang tak tertagih, Piutang tak tertagih adalah jumlah klaim perusahaan yang ada pada pelanggan yang tidak dapat ditagih karena suatu alasan tertentu, sedangkan menurut Siamat (1993:201) Kredit Macet atau *Non Performing Loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah Piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

## B. Gejala-Gejala Kredit Macet

Gejala kredit macet Mahmoedin (1995:134-135), antara lain disebabkan oleh :

1. Menurunnya pendapatan bersih

Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh menurunnya penerimaan atau naiknya biaya.

2. Menurunnya penjualan secara tajam

Turunnya penjualan secara tajam adalah wajar dalam siklus hidup perusahaan, tetapi jika penurunan penjualan secara sangat tajam merupakan tanda perusahaan akan menemui titik kritis.

3. Menurunnya perputaran persediaan

Perputaran persediaan yang cepat akan memberikan kelancaran bagi perusahaan. Tetapi jika perputaran tersebut kecepataannya menurun berarti banyak barang yang tidak laku, berarti perusahaan diambang kesulitan.

4. Meningkatnya penjualan secara tajam

Naiknya penjualan secara tajam disebabkan perusahaan ingin mempunyai uang secara cepat guna melakukan penjualan sehingga harga jual dibawah harga pokok.

5. Menurunnya perputaran piutang

Perputaran piutang yang cepat juga akan memberikan bagi perusahaan untuk segera melikuiditas. Tetapi jika piutang sulit ditagih akan menimbulkan bagi perusahaan dalam melanjutkan operasionalnya.

6. Menurunnya modal lancar

Turunnya modal lancar dapat disebabkan karena melakukan pembelian, membengkaknya hutang kepada pihak ketiga dan mungkin karena pemborosan.

7. Nasabah mulai ingkar janji.

8. Nasabah membuat laporan fiktif.

9. Nasabah tidak terbuka, yaitu dengan merahasiakan sesuatu hal yang erat kaitannya dengan penggunaan kredit.

10. Nasabah menolak wawancara.

C. Faktor-Faktor Kredit macet

Faktor-faktor penyebab kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002 : 472-474) adalah sebagai berikut:

1. Sisi Nasabah

a) Faktor Keuangan

Faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- Utang meningkat sangat tajam
- Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset
- Pendapatan bersih menurun
- Penurunan penjualan dan laba kotor
- Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit
- Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat
- Piutang tak tertagih meningkat
- Perputaran persediaan semakin lambat
- Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur
- Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu, dan sebagainya.

b) Faktor Manajemen

Faktor-faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain :

- Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan
- Tidak ada *codersasi* dan *job description* yang jelas
- Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (*key person*)
- Kegagalan dalam perencanaan
- Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap
- Pelanggaran terhadap perjanjian atau *klausula* kredit
- Penyalahgunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengambilan kredit untuk kepentingan perusahaan tersebut justru

digunakan untuk kepentingan pribadi atau diluar kepentingan perusahaan.

- Pendapatan naik dengan kualitas menurun.

c) Faktor Operasional

Faktor-faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain :

- Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun
- Kehilangan satu atau lebih pelanggan
- Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik
- Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan atau tidak efisien
- Operasional perusahaan mencemari lingkungan, dan sebagainya.

2. Sisi Eksternal

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- a. Perubahan kebijaksanaan pemerintah disektor riil
- b. Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen perusahaan
- c. Kenaikan harga-harga faktor produksi yang tinggi (BBM, angkutan, dan sebagainya)
- d. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah
- e. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman

- f. *Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi* dan kebijakan moneter lainnya
- g. Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya
- h. Bencana alam (*force majeure*), dan sebagainya.

### 3. Sisi Bank

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain :

- a. Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja
- b. Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman
- c. Menerbitkan cek kosong
- d. Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit
- e. Adanya over kredit atau *underfinancing*
- f. Manipulasi data
- g. *Over taksasi* agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi
- h. Kredit topengan, tampilan atau fiktif
- i. Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit
- j. Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit, dan sebagainya.

#### 2.1.9 Pengendalian Kredit Bank

##### A. Pengertian Pengendalian Kredit Bank

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Menurut Koontz (1996) seperti dikutip oleh Hasibuan (2009 :104-105) mengatakan “*Controlis the measurement and correction of the performance*

*of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and plans devided to acton then are accomplished*". (pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara).

Sedangkan menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank (2009:105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

#### B. Tujuan Pengendalian Kredit Macet

Tujuan pengendalian kredit menurut Hasibuan (2009:105), antara lain untuk:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi presentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

### C. Sistem Pengendalian Kredit Macet

Menurut Hasibuan (2009:105) sistem pengendalian kredit macet antara lain :

1. *Internal control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
2. *Audit control of credit* adalah sistem pengendalian dan penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu pembukuan kredit bank.
3. *External control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun Akuntan Publik.

### D. Teknik-teknik Pengendalian Kredit Macet

Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan kearah kredit untuk menghilangkan resiko kredit tersebut tidak akan dibayar lunas.

Langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk mengamankan kreditnya, data digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif*.

#### 1. Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Teknik pengendalian *preventif* data dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur

dengan menggunakan prinsip 5C, yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*.

## 2. Teknik Pengendalian *Represif*.

Teknik pengendalian *represif* yaitu teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami kemacetan.

## E. Strategi Penyelesaian Kredit

Strategi pengendalian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

### 1. Pemberian surat tagihan 1,2, dan 3

Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.

### 2. Melalui negosiasi bank dengan debitur

Bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.

### 3. Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi

Yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti pengadilan negeri, kejaksaan dan lain-lain.

### 4. Debitur macet dinyatakan pailit karena *insolvency* atau bangkrut

Penagihannya data diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), di mana kedudukan bank data sebagai kreditur *preferent*, bila mana bank telah

melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi bila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan bila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayar tetap merupakan utang debitur yang harus dibayar. Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil resiko namun tidak dapat menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun yang sudah terjadi. Dari beberapa langkah teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum variabel penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank.

#### 2.1.10 Pengertian Efektifitas

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektifitasnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008:7), efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektifitas berkaitan

dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai.

Aspek-aspek efektifitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), efektifitas bisa dijelaskan bahwa efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektifitas jika melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik
- Aspek rencana atau program, yaitu rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif
- Aspek ketentuan dan peraturan, efektifitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
- Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

Menurut Sondang (2000:32), dalam pencapaian hasil efektivitas dalam suatu organisasi dapat diukur dari beberapa hal antara lain:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana

Dengan adanya ukuran keefektivan tersebut, suatu pengendalian internal yang diterapkan akan berlangsung secara efektif.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit yaitu:

Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Ayu Dwi Purwatiasih (2014)	Analisa pengendalian internal dalam pemberian pada PT. BPR KANAYA	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intenal dalam pemberian kredit pada PT BPR KANAYA telah memadai.
Budiyati (2008)	Evaluasi pengendalian internal pemberian kredit	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intenal pemberian kredit yang diterapkan di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali sudah efektif
Pemi Rosalina Hadi (2014)	Sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam Bank Danamon sudah berjalan dengan baik, tetapi belum bisa dikatakan efektif karena masih ada kredit khusus di kredit investasi tetapi Bank bisa dibilang Bank sehat terbukti dari presentasi kredit.
Putri Ari Sandi Dwi Atmoko dan Zahro Z.A (2015)	Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif dalam upaya mendukung pengendalian manajemen kredit (studi pada KSP.Tri Aji Mandiri Kota Kediri)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit sudah mendukung pengendalian manajemen kredit secara baik.

### **2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Dari kerangka pemikiran teoritis yang menjadi objek penelitian yaitu di PD BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo yang bertempat di Jl. Raya Jepara-Bangsri Km. 9. Dalam PD BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo aktivitas utama yang dilakukan adalah simpan pinjam kepada debitur maupun kreditur. Dalam pemberian kredit maka diperlukan adanya pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisis atas sebuah aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Oleh karena itu pengendalian internal diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian aktivitas pengkreditan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian perusahaan.

Tujuan pengendalian internal itu akan dicapai apabila sistem atau prosedur, kebijakan yang ditetapkan menjadi unsur dari pengendalian internal benar-benar efektif. Pengendalian internal yang baik pada pemberian kredit umumnya dicapai melalui pemisahan tugas dan wewenang sehingga seseorang dapat melakukan suatu transaksi pada terjadinya pemberian kredit dari awal sampai akhir. Dengan adanya pemisahan tugas tersebut akan memudahkan bagi manajemen PD BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo.

Akan tetapi tujuan utama dari pengendalian internal pada kredit adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit supaya dapat mengurangi terjadinya kegagalan pengkreditan dan mengurangi terjadinya kredit macet.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

